

## APPENDICES

### Appendix 1

#### **Virus corona: UN 2020 resmi dibatalkan, 'harus ada nilai setara yang berlaku universal' untuk menyeleksi murid baru**

24 Maret 2020

Diperbarui 25 Maret 2020

**Ujian Nasional (UN) tahun ini resmi dibatalkan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada Selasa (24/03). Sejumlah orang tua murid dan sekolah masih bingung mengenai sistem seleksi penerimaan murid baru, karena 'tidak ada nilai yang bersifat setara dan universal'.<sup>(1)</sup>**

Dalam pernyataannya yang dikemukakan secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan alasan nomor satu pembatalan UN "adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswa kita, keamanan keluarga mereka, dan kakek-nenek siswa-siswa tersebut".<sup>(2)</sup>

"Kalaupun kita melaksanakan Ujian Nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar bukan hanya siswa tapi juga keluarga dan kakek nenek siswa-siswa tersebut," papar Nadiem.<sup>(3)</sup>

Lagipula, Nadiem menambahkan, UN bukan syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jalur pendidikan yang lebih tinggi.<sup>(4)</sup>

- Sekolah di rumah mulai diterapkan, tak semua siap
- Sekolah, universitas meniadakan kelas di tengah wabah virus corona
- Jakarta tanggap darurat Covid-19, banyak pegawai masih ke kantor: 'Boroboro social distancing'

Nadiem mengatakan ujian kelulusan sekolah masih bisa dilakukan masing-masing sekolah, "tapi tidak diperkenankan melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas".<sup>(5)</sup>

"Ada berbagai macam opsi, sekolah bisa melakukan ujian sekolah, misalnya, melalui online atau melalui angka nilai lima semester terakhir. Dan ujian sekolah tersebut tidak kami paksa untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum bahkan semester terakhir," jelas Nadiem. <sup>(6)</sup>

Sebelumnya, dalam pembukaan rapat terbatas pada Selasa (24/03), Presiden Jokowi mengemukakan tiga opsi. <sup>(7)</sup>

"Opsinya ada tiga, Pertama, UN tetap dilaksanakan, kedua UN ditunda waktunya, atau ketiga UN ditiadakan sama sekali," jelas Presiden Joko Widodo. <sup>(8)</sup>

Saat ini, menurut Presiden Jokowi, ada 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh tanah air. <sup>(9)</sup>

"Oleh karena itu harus segera diputuskan. Prinsip yang utama, kebijakan ini bisa kita ambil tapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN," pungkas Presiden. <sup>(10)</sup>

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengatakan DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat untuk mempercepat penghapusan ujian nasional yang sedianya dilakukan mulai tahun depan, sebagai imbas dari wabah virus corona. <sup>(11)</sup>

Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian masif. UN untuk siswa SMA semula dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret, sementara ujian nasional bagi siswa SMP dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang. <sup>(12)</sup>

"Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujar Huda, seperti dikuti dari kantor berita *Antara*. <sup>(13)</sup>

Anggota Komisi X DPR, Putra Nababan, mengamini keterangan Syaiful Huda. Menurutnya, rapat dengan Kemendikbud kemarin sepakat meniadakan UN. <sup>(14)</sup>

"Ujian Nasional untuk murid-murid SD, SMP, dan SMA jika dilaksanakan tahun ini dapat membahayakan kesehatan jutaan murid, para guru dan keluarga mereka semua," kata Putra Nababan dari Fraksi PDI Perjuangan kepada BBC News Indonesia, Selasa (24/03). <sup>(15)</sup>

Kalaupun UN dilaksanakan secara online, Putra Nababan menilai belum tentu secara infrastruktur fasilitasnya siap untuk digunakan. Pengawasan guru terhadap murid saat sedang menjalankan ujian juga memiliki kendala. <sup>(16)</sup>

"Sehingga menurut saya memang sudah tepat jika UN ditiadakan. Kita fokuskan anak didik dan para guru untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar secara online hingga akhir semester ini," katanya. <sup>(17)</sup>

Terkait dengan pembatalan UN 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 mengatur penerimaan murid baru sebagai berikut: <sup>(18)</sup>

- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir dan/atau <sup>(19)</sup>
- Berdasarkan prestasi akademik/non-akademik di luar rapor sekolah <sup>(20)</sup>

Beberapa orang tua murid yang dihubungi BBC News Indonesia mengatakan mendukung kebijakan pemerintah yang membatalkan UN tahun ini demi alasan keselamatan akibat virus corona. <sup>(21)</sup>

Namun, senada, mereka meminta pemerintah juga memberikan kepastian dan menyiapkan rencana antisipasi mengenai sistem penerimaan murid baru. <sup>(22)</sup>

Seperti yang diungkapkan Yetti Utari dan Ken Sugandhi kepada BBC News Indonesia. <sup>(23)</sup>

"Kalau UN dibatalkan, penerimaan peserta didik baru akan ribet atau susah kecuali ada standar nilai pengganti yang digunakan, misalnya rata-rata nilai rapor, atau nilai ujian sekolah dilaksanakan online. <sup>(24)</sup>

Jadi, harus ada nilai atau sistem yang dilaksanakan universal, jadi semuanya punya hak dan kesempatan sama juga, walaupun ditetapkan zonasi atau umum tidak apa, tapi harus ada patokan yang jelas," kata Yetti. <sup>(25)</sup>

"Saya bicara dengan orang tua lain. Intinya, pemerintah harus merencanakan cara penerimaan siswa baru di sekolah bagaimana, karena selama ini seperti di Jakarta, masih menggunakan nilai UN, seperti berdasarkan nilai rapor atau ujian online. <sup>(26)</sup>

Kalau ujian online yang mengerjakan bisa orang tua atau kakaknya, jadi juklak juknis-nya harus jelas," kata Ken. <sup>(27)</sup>

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Jakarta Mas Ayu Yuliana juga menanyakan mengenai dasar nilai apa yang akan dipakai bagi siswa SMP untuk masuk SMA ketika UN dihapus. <sup>(28)</sup>

Menurutnya, sistem zonasi bukan hanya semata tentang jarak dari rumah ke sekolah yang menyebabkan seseorang diterima di sekolah tersebut, tapi juga ada persaingan untuk merebutkan kursi sekolah yang terbatas. <sup>(29)</sup>

"Tetap ada unsur nilai yang disertakan sehingga murid bersaing untuk masuk ke sekolah zonasi itu, tidak semata-mata jarak sekolah dari rumah," katanya. <sup>(30)</sup>

Ia pun pesimistis jika dasar penerimaan siswa baru sekedar dilihat dari nilai raport siswa karena standar satu sekolah dengan sekolah lain dalam memberikan nilai berbeda. <sup>(31)</sup>

"Apakah angka 8 di sekolah A setara dengan 8 di sekolah B dan C. Berarti sekolah bisa kasih nilai setinggi-tingginya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi kalau soal UN kan diakui, rata dan setara. Kasihan sekolah yang selektif banget kasih nilai untuk muridnya sementara ada juga sekolah yang mungkin angka 8-nya itu diobral,"ujarnya. <sup>(32)</sup>

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Jakarta ini juga mengaku kaget dengan keputusan cepat pemerintah menghapuskan UN tahun ini. <sup>(33)</sup>

"Artinya, perjuangan-perjuangan yang sudah diusahakan guru dan siswa, ya *ending*-nya berakhir tidak jelas. Ini pendapat saya dan mungkin juga anak-anak seperti itu, ada rasa sedih," kata Yuliana. <sup>(34)</sup>

Menurutnya, mungkin lebih baik jika pemerintah untuk mengundur jadwal UN terlebih dahulu sambil mencari cara alternatif dan melihat perkembangan virus corona, sebelum memutuskan untuk membatalkan UN. <sup>(35)</sup>

"Ini seperti berjuang tapi tidak ada akhirnya. Anak-anak semangat belajar, mereka siap hadapi UN, tapi tidak diujikan, Saya pikir tadinya diundur atau dicarikan bentuk lain sehingga tidak menurunkan semangat anak-anak untuk terus belajar," kata Yuliana. <sup>(36)</sup>

Namun demikian, Yuliana mendukung keputusan pemerintah karena keselamatan para siswa dan masyarakat adalah yang utama. <sup>(37)</sup>

Ia pun kini menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari dinas pendidikan mengenai penghapusan UN dan sistem penilaian pengganti. <sup>(38)</sup>

Koordinator Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji mendukung langkah pemerintah membatalkan UN karena ujian itu sudah lagi tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk dilakukan. <sup>(39)</sup>

Terdapat tiga alasan, kata Ubaid, yaitu pertama adalah UN terbukti gagal melakukan pemetaan dan evaluasi kualitas kemampuan siswa karena UN menyeragamkan sistem penilaian siswa di perkotaan yang dilengkapi fasilitas memadai dengan siswa di kampung yang sekolahnya hampir roboh. <sup>(40)</sup>

"Kedua, UN tidak relevan lagi dari awalnya sangat *powerful* karena menentukan kelulusan siswa sekarang menjadi tidak jelas apa tujuan dilakukan UN," katanya. <sup>(41)</sup>

Terakhir adalah, kata Ubaid, UN ternyata menumbuhkan budaya koruptif di sekolah yang seharusnya berperan sebagai pelopor pendidikan karakter belajar kejujuran dan tanggung jawab. <sup>(42)</sup>

"UN menjungkirbalikan semuanya, karena justru menyuburkan tindakan koruptif dimana ada soal yang dibocorkan, kemudian korupsi biaya UN, kerja sama sekolah untuk melakukan kecurangan, dan ada bisnis sekolah dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan jam belajar di luar sekolah, jadi sudah menyimpang," katanya. <sup>(43)</sup>

Sehingga, kata Ubaid, sudah tepat jika UN dihapuskan. <sup>(44)</sup>

Ujian Nasional pada tahun 2020 sejatinya akan diikuti oleh sekitar 8,3 juta siswa dari sekitar 106.000 satuan pendidikan di Indonesia baik dari SD hingga SMA. Mulai tahun depan Ujian Nasional memang sudah diputuskan ditiadakan dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. <sup>(45)</sup>

## Appendix 2

## Tajuk

# Soeharto dan Fatsoen Pengampunan

Awalnya adalah rencana Kejaksaan Agung untuk membuka kembali kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan presiden Soeharto. Selama ini, kasus tersebut mengendap akibat kondisi penguasa Orde Baru itu yang sakit-sakitan. Namun, ternyata berkali-kali presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu tampil di publik. Hal itu yang memunculkan desakan agar kasus Soeharto dibuka lagi. Akhirnya seperti yang kita ketahui bersama, Soeharto masuk RS Pusat Pertamina.

Mulailah parade pembesuk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif, dan Gubernur Lemhannas Muladi juga datang membesuk. Mereka, kecuali Sudi, memberikan pernyataan agar kasus Soeharto ditutup saja dengan pertimbangan kemanusiaan serta jasanya yang besar bagi bangsa dan negara ini.

Presiden pun menimpali lewat Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Presiden meminta pertimbangan lembaga tinggi negara untuk mengambil keputusan soal ini. Pimpinan MPR pun mengadakan rapat soal ini karena pengusutan Soeharto merupakan amanat Tap MPR No XI/1998. Yang menarik, tak ada satu partai pun yang bersuara menentang arus pengampunan tersebut. Kini, yang mereka cari adalah jalan yang paling aman dari dosa sejarah.

Gerakan reformasi pada 1998 menggelembungkan semangat perbaikan dan penghukuman. Langkah pertama dilalui dengan tumbanginya Soeharto dari puncak kekuasaan. Langkah selanjutnya adalah penataan institusi dan konstitusi/legislasi. Sistem pemilu dan sistem kepartaian diubah, penerapan asas trias politika diluruskan, dwifungsi ABRI dihapus, dan seterusnya. Itulah wujud semangat perbaikan. Sedangkan semangat penghukuman tak kunjung hadir. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal kejelasan tata nilai, keadilan, dan tentu saja bagi kesuksesan reformasi.

Kini, kata reformasi menjadi lelucon, dihindarkan, dan bau. Semua itu akibat kegagalan mewujudkan ide reformasi. Koruptor lama makin menjadi, koruptor baru bak epidemi. Kita menjadi kehilangan waktu, sumber daya, dan sumber dana. Indonesia benar-benar di kubangan krisis.

Melalui pengaburan nilai, kita dibuat tolol. Penjarahan di-bilang biaya krisis. Maka jadilah BPPN sebagai ajang sulapan dan cuci tangan. Semua limbahnya dicekakkan ke mulut rakyat. Semuanya menjadi utang negara yang harus dibayar rakyat lewat APBN. Legislator, birokrat, penegak jukum, pengusaha, konsultan, dan juga ilmuwan-aktivis melakukan pesta bagi-bagi jatah. Maka yang kita saksikan kemudian adalah tak ada penilep dana BLEI dan dana rekapitalisasi yang masuk penjara, bahkan mereka bisa mengendalikannya negeri ini.

Kini rakyat yang harus menanggung beban Rp 600 triliun. Sedangkan para konglomerat hitam sibuk berinvestasi dari satu negeri ke negeri lain. Inilah salah satu model pengampunan tanpa kita tahu apa dosanya dan apa pelanggarannya. Maka tata nilai apakah yang hendak kita wariskan?

Melalui pencitraan, kita dibuat lupa. Walau selama 32 tahun kekuasaan otoriter yang represif dengan korban nyawa, mati sosial, cacat fisik, dan segala dampak bawaannya seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, bahkan kegilaan, toh kita tak pernah mendengar ada penjahatnya. Orang-orang yang ditindas negara hanya karena perbedaan paham dan politik tak mendapatkan keadilan.

Wacana kejahatan terhadap kemanusiaan kini sudah sayup-sayup. Lupa. Kini, Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibiarkan terus mengendap menjadi barang usang dan aneh. Kita tetap mengenal para penjahat kemanusiaan itu sebagai pahlawan. Maka, tata nilai apakah yang hendak kita wariskan?



**4.51%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**20.05%** IN QUOTES

## Report #11625522

CHAPTER 1 INTRODUCTION 1 Background of the Study Discourse analysis concernsthe study of the relationship between language and the contexts in which it is used. Discourse analysis uses language in the form of written texts of all kinds, and spoken data, from conversation to the form of talk (McCarthy, 1992). Discourse analysis allows people to understand how messages in the contexts are organized or used. Besides, discourse analysis can also allow people to know the authors' point of view of the texts created. Written or spoken data can be found everywhere. However, in this study, the writer chooses mass media as the objects of investigation. Mass media becomes one of the many tools that is used for getting information in daily activities. The information can be obtained either by printed media such as magazines and newspapers, or electronic media such as radio, website, and social media. If someone as a consumer selects certain types of content in certain media, they gain insight into the relationship between the attributes of the media (real or perceived) as well as the social and psychological functions which they serve (Katz et al., 1973). One example of mass media that serves information in many kinds of printed or electronic media is news. Lu Dingyi (1943) (as cited in Yang, 2016) defines news as the report of recent facts. All events that happen may be